



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA
KOMISI D DPRD KOTA YOGYAKARTA

Komitmen Kawal Seluruh Program Hajat Hidup Masyarakat

YOGYA (KR) - Komisi D menjadi alat perlengkapan dewan yang cukup strategis menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena tugasannya yang menjadi mitra kerja eksekutif untuk bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta bahkan telah berkomitmen dalam mengawal seluruh program yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani, menjelaskan hajat hidup masyarakat yang dimaksud ialah meliputi seluruh fase kehidupan yakni sejak lahir hingga meninggal dunia. "Bahkan sejak masih dalam kandungan juga harus mendapatkan atensi. Begitu juga ketika sudah dilahirkan, tumbuh kembang anak, ketika menginjak remaja, dewasa, lansia sampai meninggal dunia harus mendapatkan hak-haknya. Pemenuhan hajat hidup ini jadi perhatian kami," tandasnya.

Seperti halnya dalam rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran pada Senin (13/11) kemarin, Komisi D mengundang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pencermatan usulan kegiatan tahun depan. Hal sama juga dilakukan dengan mengundang OPD lain yang menjadi mitra kerja seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan lainnya.

Pembahasan bersama Dinas Kesehatan salah satu yang menjadi pengawasan ialah menyangkut kasus stunting atau berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Angka stunting di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah berada di bawah target nasional yakni 13 persen, sedangkan target nasional 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Akan tetapi harus terus diupayakan agar Kota Yogyakarta bisa zero stunting. Sehingga sejak dalam kandungan, bayi harus mendapatkan perhatian agar kelak ketika dilahirkan dalam kondisi sehat.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi menuturkan sudah ada upaya yang cukup serius dari Dinas Kesehatan dalam menanggulangi angka stunting. Bahkan para remaja yang kelak akan menjadi calon ibu sudah dijamah dengan gerakan pemberian obat penambah darah. Remaja putri pada kondisi saat ini rentan mengalami anemia lantaran pola makan yang kurang "sehat". Menjamurnya makanan cepat saji serta minuman tinggi gula yang semakin digemari kaum remaja, menjadi perhatian tersendiri. "Ada program rutin dari Dinas Kesehatan yang mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan obat penambah darah bagi pelajar putri. Jangan sampai mereka mengalami anemia karena juga bisa memengaruhi kesehatan ketika kelak menjadi ibu," urainya.

Begitu pula bagi pasangan pranikah maupun pasangan usia subur. Terdapat program baik berupa edukasi maupun pemberian asupan gizi seimbang. Antisipasi kasus stunting memang harus sudah dimulai sejak remaja agar memiliki pemahaman yang memadai. Sehingga Komisi D mendorong agar posyandu remaja pada tahun depan bisa lebih diperhatikan. Selama ini kegiatan posyandu yang rutin bergilir ialah posyandu anak dan posyandu lansia. Sementara posyandu remaja terkesan vakum.

Kendati demikian, keberadaan posyandu kini mulai mendapat perhatian yang optimal. Pasalnya selain mendapatkan antropometri kit, kader posyandu juga sudah mulai diperhatikan melalui program fasilitasi. Setidaknya fasilitasi yang akan diberikan bagi 10 kader posyandu di tiap wilayah bisa pengganti uang transportasi maupun bentuk apresiasi dari pemerintah. Dengan begitu maka kegiatan di posyandu bisa semakin semarak dan mampu bergilir secara rutin.

Di samping itu, perkembangan anak tidak bisa disepelekan. Sebagai calon generasi penerus, anak merupakan aset yang paling berharga bagi bangsa. Beruntung Kota Yogyakarta telah meraih predikat kota ramah anak serta Kota Layak Anak (KLA) untuk kategori utama. Hanya, saat ini masih harus bekerja keras agar mampu meraih kategori paripurna atau KLA yang sesungguhnya. Sehingga perlindungan anak tidak sekadar menjadi kegiatan di tingkat organisasi perangkat daerah melainkan benar-benar terimplementasi hingga kelembagaan di masyarakat.

Sejalan dengan itu, hak atas pendidikan tidak bisa disepelekan. Paling tidak, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mampu mengakomodir penduduk Kota Yogyakarta. Oleh karena itu sistem penerimaan peserta didik baru sudah menjadi perhatian jajaran Komisi D agar memberikan peluang secara proporsional bagi warga kota. Namun bagi yang sekolah di lembaga swasta juga ada intervensi dari pemerintah supaya beban masyarakat atas biaya pendidikan tidak memberatkan.

Fahmi menambahkan, terkait hak mendapatkan pekerjaan, Dinsosnakertrans diharapkan mampu memfasilitasi pelatihan kerja yang optimal. Terutama jenis pelatihan yang memang dibutuhkan oleh pemberi kerja, menjembatani pemangangan hingga proses perekrutan. Bantuan peralatan usaha juga harus selalu dialokasikan bagi penduduk lemah yang hendak berusaha mandiri. "Apa yang sudah dipaparkan untuk rencana kerja tahun depan oleh eksekutif, akan kami kawal betul agar benar-benar terealisasi dengan sasaran yang tepat," imbuhnya.

Begitu pula bagi penduduk yang meninggal dunia, khususnya dari keluarga ekonomi lemah yang masuk dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) maupun data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Program santunan kematian yang saat ini diberikan senilai Rp 3 juta, kelak diupayakan bisa ditingkatkan minimal menjadi Rp 5 juta bagi setiap penduduk rentan yang meninggal dunia. Besarannya itu bukan hanya untuk membantu proses bekal bumi saja melainkan juga kegiatan lainnya. Hanya, usulan itu masih harus melalui studi atau kajian terlebih dahulu dan paling cepat bisa diakomodir pada perubahan anggaran tahun depan. (Dhi)4

Ketua Komisi D memimpin rapat pembahasan bersama eksekutif.

Jajaran Komisi D menjalani rapat pembahasan.

Mitra kerja eksekutif mengikuti rapat pembahasan bersama Komisi D.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005